PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

JL. Soekarno Hatta no 714 Gede Bage

TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

Logo PA

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA .....TAHUN 2020
Nomor : W10-A/.. /..../I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama ....
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : .....
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,	....., Januari 2020 Ketua Pengadilan Agama....
Drs. M. TAUFIQ HZ., M.H.I. NIP. 19550219.198302.1.001	..... NIP.

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA .....

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	
		e. Index responden Pengadialan Tingkat Pertama yang puasterhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court	
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi.	

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	
5	Terlaksananya penataan arsip perkara	a. Persentase Retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	

Kegiatan	Anggaran
1. Sekretariat.....	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat,

Drs. M. TAUFIQ HZ., M.H.I.
NIP. 19550219.198302.1.001

....., Januari 2020
Ketua Pengadilan agama .....,

.....
NIP.

Catatan;

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Wilayah PTA Jawa Barat tahun 2020 mohon mengikuti petunjuk ini, sebagai berikut :

   Penulisan:

   1) Cover dibuat menarik warna dasar putih dan hijau dengan latar gedung pengadilan dan logo masing-masing Pengadilan Agama (Menggunakan Kertas minyak).
   2) Isi pernyataan perjanjian kinerja menggunakan ukuran kertas HVS 80 gram, margin kiri 3.5, kanan 1.5, atas 3 bawah 3 cm dengan huruf Arial 12.
2. Jumlah jilid Cover, dibuat minimal rangkap 2 (Untuk PTA Jawa Barat dan Pengadilan Agama yang bersangkutan)
3. Penandatangan Perjanjian Kinerja dilakukan serempak di PTA Jawa Barat oleh Ketua Pengadilan Agama se wilayah Jawa Barat dihadapan Ketua PTA Jawa Barat (waktu akan ditentukan kemudian).
4. Pada saat acara pendatangan Perjanjian Kinerja tahun 2020, selain membawa perjanjian kinerja dimaksud juga membawa hasil evaluasi kinerja terkait perjanjian kinerja tahun 2019.
5. Penempatan IKU Pengadilan Agama, diawali dari IKU yang telah dibuat oleh MA secara berurut, untuk tambahan sesuai kebutuhan diurutan berikutnya.